



Bab I **Pendahuluan**

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dasar Hukum Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah :

- a. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 1973 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor SD.19/14/44 Tanggal 09 Desember 1972.
- b. Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Penetapan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.69 tahun 1973 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi Peraturan Daerah.
- c. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Tingkat I Nomor 360 Tahun 1978 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Perubahan nama yang semula pembentukan Badan Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ada sekarang disesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KPUD .7/7/39-26 Tanggal 31 Maret 1978.
- d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 ; Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08).
- e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah



Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9).

- f. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- g. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019, tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pajak Daerah, Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan sistem informasi pendapatan;
- c. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah;
- d. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang penerimaan bukan pajak daerah;
- e. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;



- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka struktur Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 - Sub Bagian Perencanaan Program;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan, membawahkan:
 - Sub Bidang Perencanaan Anggaran dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan;
 - Sub Bidang Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan.
- d. Bidang Pajak Daerah, membawahkan:
 - Sub Bidang Pendataan, Administrasi, dan Keberatan Pajak;
 - Sub Bidang PKB dan BBNKB;
 - Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya.
- e. Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah, membawahkan:
 - Sub Bidang Retribusi Daerah;
 - Sub Bidang Penerimaan Lain-lain;
 - Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
- f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, membawahkan;



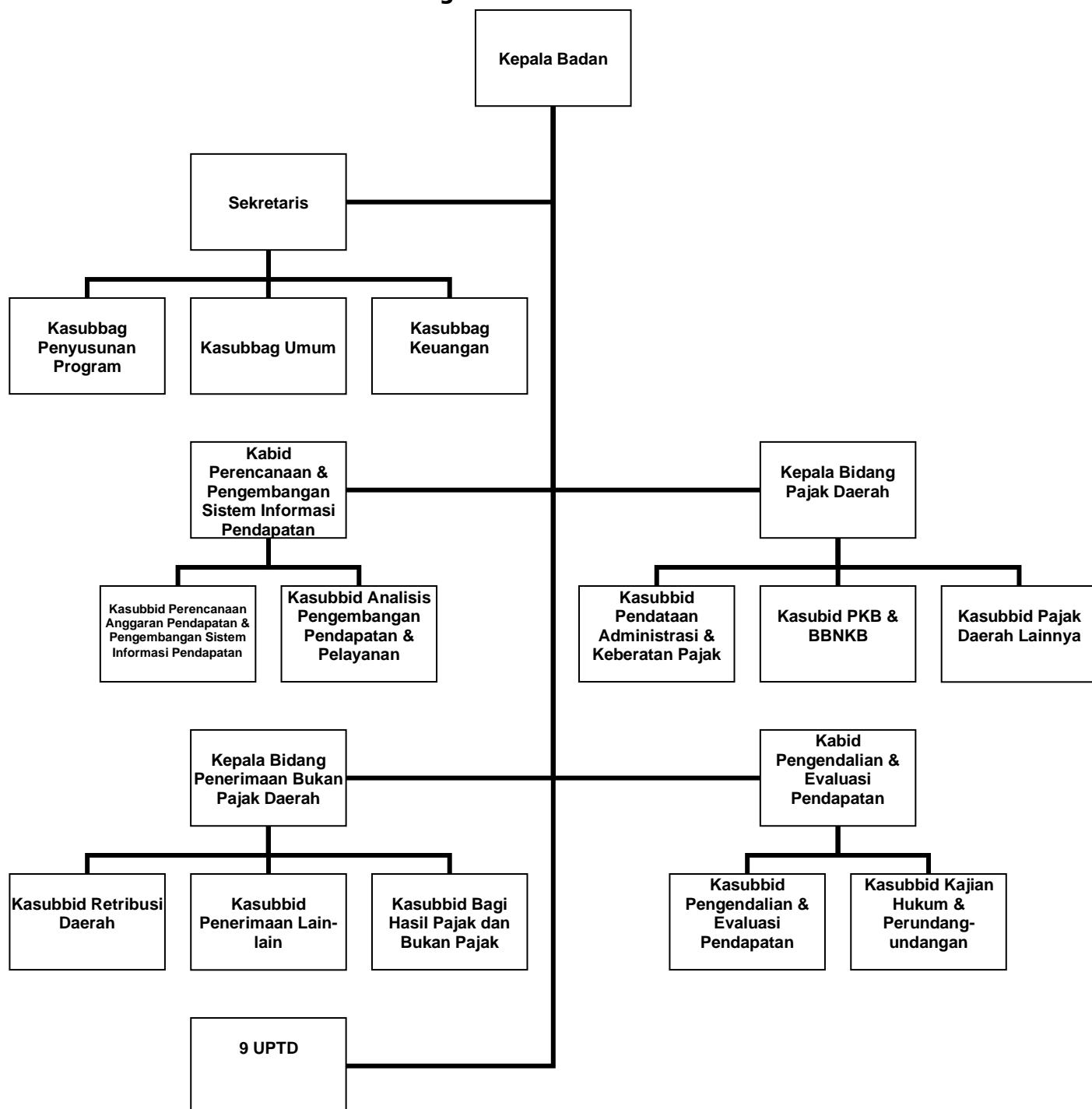
- Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan;
- Sub Bidang Kajian Hukum dan Perundang – Undangan.
- g. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD)
 - Kepala UPTD
 - Sub. Bagian Tata Usaha
 - Seksi Pembukuan dan Penagihan
 - Seksi Pendataan dan Penetapan



Struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

Gambar I.1

Struktur Organisasi BAPENDA Prov. Kaltim





D. SUMBER DAYA MANUSIA

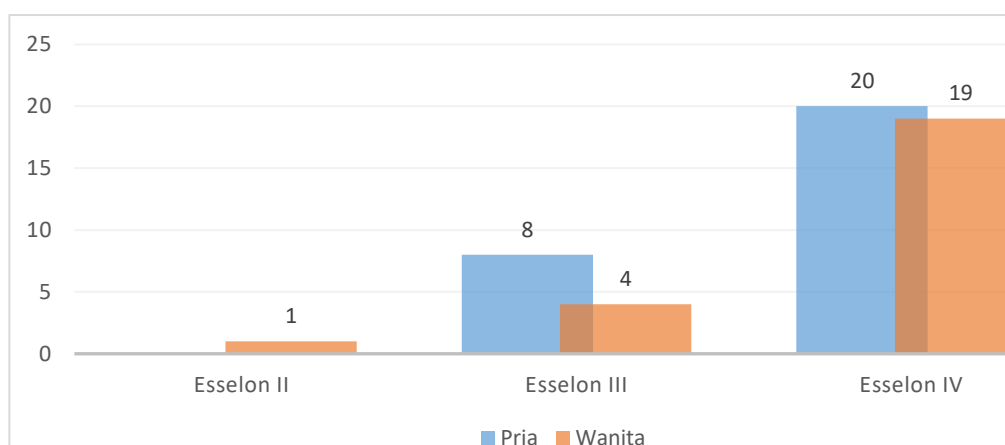
Dalam rangka melaksanakan kegiatan organisasi Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh 202 (dua ratus sembilan) orang yang bertugas baik di Provinsi dan tersebar di 9 UPTB Se-Kalimantan Timur.

Komposisi Pegawai terdiri dari 52 (lima puluh dua) Pejabat Struktural, yang terdiri dari Eselon II, III dan IV beserta 150 (seratus lima puluh) orang staf.

Pejabat Struktural

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas adalah :

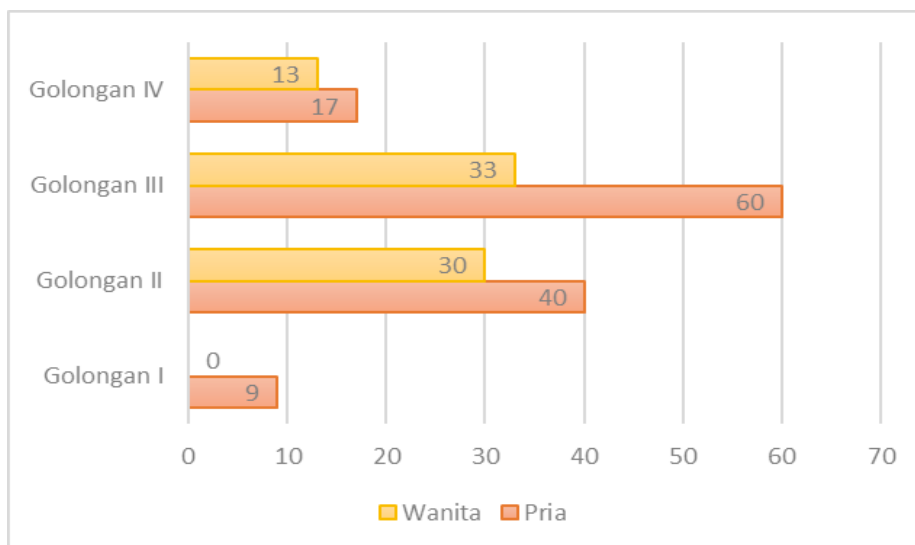
Gambar I.2
Pejabat Struktural BAPENDA Prov. Kaltim



Secara rinci jumlah pegawai BAPENDA Prov. Kaltim berdasarkan golongan dapat dilihat pada Gambar I.3



Gambar I.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

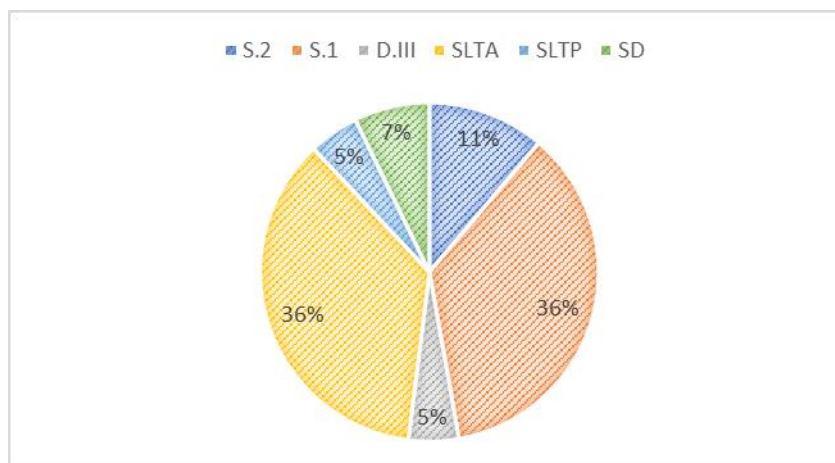


Jumlah pegawai BAPENDA Prov. Kaltim berdasarkan jenis untuk lulusan SD sebanyak 9 (sembilan) orang, lulusan SMP Sederajat sebanyak 6 (enam) orang, lulusan SMA Sederajat sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang, lulusan Sarjana Muda/Diploma Tiga sebanyak 17 (tujuh belas) orang, lulusan Sarjana 67 (enam puluh tujuh) orang, lulusan Pasca Sarjana 34 (tiga puluh empat) orang.

Secara rinci jumlah pegawai berdasarkan jenis pendidikan dapat dilihat pada Tabel I.1.

**Tabel I.1****Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan**

PENDIDIKAN	GENDER		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
1	2	3	4
S.2	14	15	29
S.1	45	23	68
D.III	6	10	16
SLTA	45	29	74
SLTP	6	0	6
SD	9	0	9
JUMLAH	125	77	202

Gambar I.4**Persentase Jumlah Pegawai BAPENDA Prov. Kaltim Berdasarkan Pendidikan****E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Badan Pengelola Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur merupakan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur berkoordinasi dengan PD penghasil untuk menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan utama dalam



pembangunan Kalimantan Timur sehingga menjadi sangat penting. Dengan demikian dapat dirumuskan Aspek Strategis Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Terciptanya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang efisien dan efektif;
2. Terwujudnya Kekuatan Fiskal Daerah dalam APBD;
3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah dari sektor Pajak Daerah.

F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tanggung jawab mengoptimalkan kinerja peningkatan Pendapatan Daerah dan Pelayanan Publik. Fungsi utamanya dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah terdapat permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM). Sebab, peningkatan pelayanan yang dilakukan Bapenda membutuhkan tambahan SDM yang mumpuni agar seluruh aktivitas dapat berjalan dengan baik.
2. Sejalan dengan perkembangan teknologi, Bapenda melakukan digitalisasi pelayanan. Hal ini otomatis membutuhkan kondisi jaringan yang stabil. Sayangnya di lapangan masih terdapat beberapa masalah eksternal dan internal yang membuat jaringan menjadi terganggu.
3. Letak geografis Kalimantan Timur yang menyebabkan wajib pajak yang berkewajiban membayar pajak 5 tahunan memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar untuk menuju Samsat Penuh.
4. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat varian Delta menyebabkan mobilitas dan kegiatan masyarakat menurun sehingga berimplikasi terhadap penerimaan pajak retribusi.
5. Masih banyaknya tunggakan PKB yang belum terealisasi, sementara penegakan hukum melalui razia kendaraan tidak bisa lagi dilaksanakan oleh kepolisian sesuai kebijakan Kapolri.
6. Dengan selalu berkembangnya teknologi informasi khususnya IT kesamsatan, menyebabkan perlunya selalu diadakan inovasi-inovasi



yang bertujuan untuk memudahkan birokrasi dan layanan kepada wajib pajak.

7. Terdapat sumber-sumber pendapatan baru pada Perangkat Daerah namun belum didukung dengan sarana prasarana serta regulasinya.

G. SARANA DAN PRASARANA KANTOR

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Tanah	22783	m2
2	Area Parkir	4	Area
3	Ruang Rapat	4	Ruang
4	Ruang Kerja Struktural	19	Ruang
5	Ruang Kerja Staf	9	Ruang
6	Ruang Kerja Bendahara	1	Ruang
7	Ruang Perpustakaan	1	Ruang
8	Ruang Arsip	1	Ruang
9	Ruang Olahraga	1	Ruang
10	Gudang Barang	2	Ruang
11	Musholla	1	Ruang
12	Pantry	9	Ruang
13	Kantin	1	Ruang

**RINCIAN BARANG KE NERACA TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Nama barang (Berdasarkan Bidang barang)	Nilai Rp.
1	Tanah	45.862.870.280,91
2	Peralatan dan mesin	106.184.462.525,00
3	Gedung dan Bangunan gedung	186.255.719.724,52
4	Jalan, Irigasi dan jaringan	2.462.024.875,00
5	Aset Tetap lainnya	451.427.328,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.921.402.494,99
7	Akumulasi Penyusutan	(121.362.951.407,00)
Jumlah Aset Tetap		223.774.955.821,42

Dan untuk Fasilitas Penunjang operasional kerja Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur didukung fasilitas perkantoran Unit Pelayanan Pendapatan Daerah dan Koordinator Penerimaan pendapatan Daerah (SAMSAT) yang melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan pungutan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di seluruh Kabupaten / Kota antara lain :



UPTD PPRD BAPENDA SE-KALIMANTAN TIMUR:

1. UPTD PPRD SAMARINDA

Luas Tanah: 2.497,83 m2



- SAMSAT Induk Samarinda – Sempaja
- SAMSAT Penuh MT. Haryono
- SAMSAT Penuh Samarinda Seberang
- SAMSAT Pembantu Alaya
- SAMSAT Pembantu Suryanata
- SAMSAT Pembantu Loa Bakung
- SAMSAT Pembantu Sambutan
- SAMSAT Drive Thru MT Haryono
- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara Sungai Kunjang
- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara Palaran
- SAMSAT Corner Mall Mesra Indah
- SAMSAT Desa Tanah Merah
- SAMSAT Bus Korpri
- SAMSAT Bus Keliling



2. UPTD PPRD BALIKPAPAN

Luas Tanah: 1.439 m2



- SAMSAT Induk Balikpapan – Markoni
- SAMSAT Penuh Batakan
- SAMSAT Penuh Muara Rapak
- SAMSAT Cabang Pembantu Kebun Sayur
- SAMSAT Drive Thru Jendral Sudirman
- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara Manggar
- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara RS Kanujoso
- SAMSAT Corner Mall Plaza Balikpapan
- SAMSAT Corner Balikpapan Superblock (BSB)
- SAMSAT Pojok Pos Kantor Pos
- SAMSAT Bus Keliling
- SAMSAT Kelurahan Graha Indah
- SAMSAT Kelurahan Gunung Samarinda Baru
- SAMSAT Kelurahan Teritip



3. UPTD PPRD BONTANG

Luas Tanah: 4.173 m2



- SAMSAT Induk Bontang
- SAMSAT Cabang Pembantu Loktuan
- SAMSAT Pembantu Berbas Pantai
- SAMSAT Payment Point Telihan

4. UPTD PPRD KUKAR

Luas Tanah: 1.550 m2



- SAMSAT Induk Kutai Kartanegara
- SAMSAT Penuh Samboja
- SAMSAT Cabang Pembantu Cut Nyak Dien



- SAMSAT Cabang Pembantu Muara Jawa
- SAMSAT Cabang Pembantu Kota Bangun
- SAMSAT Cabang Pembantu Sanga-sanga
- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara Loa Duri
- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara Teluk Dalam
- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara Anggana
- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara Muara Muntai
- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara Sebulu
- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara Kembang Janggut
- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara Muara Badak
- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara SP 3
- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara Muara Kaman
- SAMSAT Desa Margahayu
- SAMSAT Bus Keliling
- SAMSAT Jelajah

5. UPTD PPRD KUTIM

Luas Tanah: 4.800 m²



- SAMSAT Induk Kutai Timur
- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara Muara Bengkal
- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara Sangkulirang
- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara Teluk Pandan
- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara Bengalon
- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara Muara Wahau



- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara Kaliorang
- SAMSAT Desa Sangatta Selatan
- SAMSAT Jelajah

6. UPTD PPRD KUBAR

Luas Tanah: 2.000 m²



- SAMSAT Induk Kutai Barat
- SAMSAT Cabang Pembantu Melak
- SAMSAT Cabang Pembantu Muara Tae
- SAMSAT Cabang Pembantu Pesat Bongan
- SAMSAT Cabang Pembantu Mahulu
- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara Tering
- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara Simpang Raya
- SAMSAT Desa Sri Mulyo
- SAMSAT Jelajah
- SAMSAT Terapung



7. UPTD PPRD PENAJAM



- SAMSAT Induk Penajam Paser Utara
- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara Sepaku
- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara Babulu
- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara Sotek
- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara Waru
- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara Maridan
- SAMSAT Drive Thru PPU
- SAMSAT Bus Keliling

8. UPTD PPRD PASER



- SAMSAT Induk Paser



- SAMSAT Penuh Long Ikis
- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara Kuaro
- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara Batu Kajang
- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara Long Kali
- SAMSAT Desa Damit
- SAMSAT Paten Batu Engau

9. UPTD PPRD BERAU



- SAMSAT Induk Berau
- SAMSAT Cabang Pembantu Pasar Sanggam Adji Dilayas
- SAMSAT Cabang Pembantu Talisayan
- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara Tanjung Batu
- SAMSAT Payment Point Bankaltimtara Segah



Bab II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semata, akan tetapi perlu dukungan dari Stakeholders lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten / Kota, serta Masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 – 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka seluruh SKPD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang berkesinambungan sampai dengan akhir periode RPJMD tahun 2023.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur), didalam menyusun Rencana Strategisnya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 – 2023. Sehingga didalam menentukan Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan serta Program Kegiatannya dapat selaras dengan apa yang hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan kata lain, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab untuk mengamankan Misi Pemerintahan Provinsi



Kalimantan Timur yaitu pada misi ke 2 ***Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan*** dan Tujuan ke 4 yaitu ***Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan*** serta Sasaran 7 yaitu ***Meningkatkan Pendanaan Pembangunan Daerah***.

I. Tujuan

Salah satu komponen dari perencanaan strategi tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu lima tahun kedepan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai upaya mendukung pencapaian pembangunan pemerintah Daerah. Adapun tujuan Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur adalah Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan.

II. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu. Sasaran Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Daerah
--

Adapun indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari persentase peningkatan pendapatan daerah.

Dengan target seperti terlihat pada tabel berikut ini :

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET CAPAIAN				
				R-APBD 2019	R-APBD 2020	R-APBD 2021	R-APBD 2022	R-APBD 2023
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Pendanaan Pembangunan Daerah setiap tahunnya	3,84 %	3,84 %	3,84 %	3,84 %	3,84 %

Dengan formulasi Perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \text{Realisasi Tahun } n - \text{Realisasi Tahun } n-1 / \text{Realisasi Tahun } n-1 \times 100\%$$

PERUBAHAN

Seiring dengan adanya perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019 – 2023 maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga melakukan Perubahan Tujuan dan Sasaran pada Renstra periode tahun 2019 – 2023. Adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

TUJUAN

OPTIMALISASI SUMBER SUMBER PENDAPATAN DAERAH

Indikator Tujuan.

Adapun indikator tujuan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah angka persentase seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Indikator Tujuan	Target		
	2021	2022	2023
Persentase capaian target pendapatan	100	100	100

Dengan formulasi Perhitungan:

$$\text{Capaian Kinerja} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100$$



BAPENDA

Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur

SASARAN

Sasaran Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator	Target		
			2021	2022	2023
1	Peningkatan pendapatan, pelayanan dan pengawasan sumber- sumber penerimaan pajak daerah dan retribusidaerah	Jumlah realisasi pendapatan	9.590.400.000.000	11.038.618.621.745	12.136.620.129.155

III. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja menjadi unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Tabel II.1

Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Tahun 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN
1	Optimalisasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Pelayanan dan Pengawasan Sumber-sumber Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Realisasi Pendapatan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



					10. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 11. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 12. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
--	--	--	--	--	---

IV. Strategi

Untuk lebih memudahkan pencapaian keberhasilan tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka diperlukan faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success faktor*). Berikut strategi-strategi yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.

1. Optimalisasi Pajak Daerah melalui sistem digitalisasi;
2. Optimalisasi Retribusi Daerah melalui teknologi informasi dan pembayaran non tunai;
3. Peningkatan pelayanan sesuai Standard Kepuasan Masyarakat (SKM);
4. Pengembangan Pelayanan di daerah potensial;
5. Melaksanakan Monitoring secara berkala di seluruh UPTD PPRD Bapenda, sehingga pelayanan terhadap wajib pajak semakin maksimal;
6. Melaksanakan kegiatan Penanganan penagihan Piutang Pajak Daerah;
7. Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait;
8. Optimalisasi Retribusi Daerah melalui Sistem Digitalisasi dan transaksi non tunai serta terus meningkatkan koordinasi dengan SKPD/ UPTD Pemungut Retribusi Daerah;
9. Meningkatkan koordinasi terkait tatakelola pemungutan Retribusi Daerah dengan seluruh SKPD Pemungut;
10. Mendorong transparansi data/informasi dana bagi hasil pusat ke daerah;
11. Perlu pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah dan pelayanan;
12. Perlu Mendata dan Mengevaluasi pemungutan terhadap pendapatan daerah;
13. Mengkoordinasikan penyusunan laporan secara berkala;
14. Optimalisasi pelaksanaan kajian hukum dan perundang - undangan berkenaan dengan pendapatan daerah;



BAPENDA

Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur

15. Peningkatan profesionalisme ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
16. Peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kelembagaan;
17. Perlunya analisis rencana kebutuhan sarana dan prasarana;

V. Kebijakan

Kebijakan merupakan langkah - langkah yang akan dilaksanakan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung target RPJMD tahun 2019 – 2023. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama periode tahun 2019 – 2023 mempunyai kebijakan yang terbagi dimasing – masing strateginya seperti terlihat pada tabel berikut ini :

1. Kerjasama dengan Polda Kaltim mengembangkan layanan yang berbasis teknologi informasi
2. Kerjasama dengan Perbankan, OPD Pemungut terkait dengan Inovasi layanan pembayaran retribusi daerah melalui elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETP)
3. Mengoptimalkan peran TP2DD untuk implementasi ETP
4. Mendorong UPTD Se-Kaltim agar meningkatkan pelayanan melalui peningkatan nilai SKM
5. Pengembangan pelayanan di daerah terpencil dan potensial
6. Menyusun bahan/data dari Instansi Vertikal, Instansi Pemungut, Pihak Ketiga dan Instansi Lainnya
7. Pemenuhan bahan proyeksi penghitungan target pendapatan daerah untuk penyusunan R APBD
8. Menyusun bahan pertanggung jawaban Gubernur dan Nota Keuangan pada penetapan Rancangan APBD
9. Pemutakhiran System Informasi untuk memenuhi tuntutan perubahan maupun kebijakan



BAPENDA

Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur

10. Melakukan Pemeliharaan Sistem Informasi dan Jaringan secara berkala di seluruh Layanan Pemungutan Pajak
11. Melakukan Sinkronisasi dan rekonsiliasi penerimaan
12. Melakukan penyempurnaan System Informasi Pelaporan Pendapatan daerah
13. Peningkatan kerjasama antara Provinsi, UPT PPRD Se Kaltim dan BPKAD
14. Peningkatan kerjasama antara Provinsi, UPT PPRD Se Kaltim, BPKAD dan Kas Daerah Prov. Kaltim
15. Melakukan Pengecekan Ke Lapangan
16. Menginventarisasi Subyek dan Objek PKB & BBNKB melalui pendataan NJKB di seluruh Kaltim
17. Menggali Sumber-sumber PKB & BBNKB melalui inovasi pengembangan layanan Kesamsatan di seluruh Kaltim
18. Koordinasi antara tim pembina Samsat dilaksanakan secara berkala, minimal setiap Triwulan dalam setahun sehingga Komunikasi dapat terjalin dengan baik
19. Melaksanakan Monitoring secara berkala di seluruh UPTD PPRD Bapenda, sehingga pelayanan terhadap wajib pajak semakin maksimal
20. Terlaksananya pengawasan ke perusahaan Wajib Pungut (WAPU)
21. Terlaksananya izin perusahaan Wajib Pungut (WAPU)
22. Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait, atas penilaian taksasi air permukaan
23. Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait atas penerimaan Pajak Rokok
24. Terlaksananya koordinasi dengan koordinasi dengan penyedia bahan bakar
25. Terlaksananya engisian laporan SPTPD perusahaan Wajib Pungut (WAPU)
26. Menngkatkan PBBKB perusahaan wajib pungut
27. Terlaksananya Izin Pemanfaatan air yang diterbitkan oleh dinas terkait di wilayah UPTD
28. Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait atas penerimaan Pajak Rokok
29. Kerjasama dengan pihak Perbankan dan SKPD/ UPTD Pemungut Retribusi Daerah terkait inovasi pembayaran melalui transaksi elektronik (ETP) dan berkoordinasi dengan TP2DD



BAPENDA

Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur

30. Bekerjasama dan membantu SKPD/ UPTD Pemungut retribusi daerah untuk menggali objek retribusi baru
31. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta Pemerintah Pusat guna sinkronisasi regulasi otorisasi Veteriner
32. Mengupayakan agar Perusda / BUMD / Perusahaan milik swasta dapat melakukan penyetoran ke Kas Umum Daerah Prov. Kaltim secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan
33. Melakukan sinkronisasi data dengan SKPD / UPTD Terkait setiap triwulan
34. Mengupayakan transparansi data terkait lifting migas pada saat rekonsiliasi bersama Kementerian ESDM dan SKK Migas sebelum penetapan besaran DBH Migas dan daerah kembali diberikan password untuk mengakses data lifting migas.
35. Memperjuangkan kepada pemerintah pusat terhadap besaran DBH Migas yang proporsional bagi daerah penghasil migas dengan persentase lebih dari 15,5 %.
36. Peningkatan kerjasama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kanwil DJP Kaltim serta mendorong Dinas/Kementerian terkait dalam memberikan data yang dibutuhkan untuk peningkatan penerimaan PBB-P3.
37. Mendorong para pengusaha untuk mendaftarkan NPWP Cabang sesuai dengan Pergub Kaltim No. 55 Tahun 2019
38. Melaksanakan peningkatan pengawasan pendapatan daerah
39. Melaksanakan pendataan ulang potensi retribusi daerah dengan meningkatkan akurasi sesuai kondisi riil lapangan
40. Melaksanakan pemberdayaan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan aset daerah
41. Pengelolaan BUMD perlu ditingkatkan sehingga meningkatkan deviden untuk menambah kontribusi pendapatan asli daerah
42. Melaksanakan peningkatan standar operasional pelayanan
43. Melaksanakan pelayanan pengaduan masyarakat sebagai pengontrol kualitas terhadap pelayanan pajak



BAPENDA

Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur

44. Mendorong para pengusaha untuk mendaftarkan NPWP cabang sesuai dengan Pergub Kaltim Nomor 55 Tahun 2019
45. Melaksanakan pengendalian piutang pajak
46. Koordinasi penyelesaian LHP internal dan eksternal
47. Menyusun produk hukum sebagai dasar kebijakan pemungutan pendapatan
48. Melakukan sosialisasi produk hukum
49. Pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi yang terintegrasi
50. Bimtek PPNS dan Juru Sita
51. Meningkatkan kualitas Analisis Jabatan
52. Melaksanakan/ mengikutsertakan ASN dalam bimbingan teknis
53. Melakukan koordinasi dan Penyusunan Bahan perumusan kebijakan dan Program, Monitoring, Evaluasi serta pelaporan kegiatan
54. Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan Bapenda Prov. Beserta UPTB se-Kaltim
55. Melakukan koordinasi serta penatausahaan administrasi keuangan

VI. Program

Dari kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



BAPENDA

Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berikut merupakan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021.

Tabel II.2

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Peningkatan pendapatan, pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah realisasi pendapatan	= $\frac{\text{Realisasi Tahun } n}{\text{Target Tahun } n} \times 100\%$	RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 Laporan Realisasi Bapenda Prov. Kaltim	Bapenda Prov. Kaltim



BAPENDA

Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur

C. PERJANJIAN KINERJA

Berikut merupakan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021.

Tabel II.3
Perjanjian Kinerja Tahunan Anggaran 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	T A R G E T (Rp)
1.	Peningkatan pendapatan, pelayanan dan pengawasan sumber- sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah realisasi pendapatan	Rupiah	9.590.400.000.000,-

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp215.250.297.000,-	APBD Prov. Kaltim
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp1.145.950.000,-	APBD Prov. Kaltim
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp10.043.125.000,-	APBD Prov. Kaltim
	Total Anggaran	Rp226.439.372.000,-	



BAPENDA

Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur

1. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp226.439.372.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp182.064.333.827,- dengan capaian 80,4%.

2. Target Belanja Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim

Tabel II.4

Target Belanja Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim Tahun 2021

NO.	PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2020		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	215.250.297.000,-	174.512.260.437,-	81,07
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.145.950.000,-	654.933.456,-	57,15
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10.043.125.000,-	6.897.139.934,-	68,68
Jumlah		226.439.372.000,-	182.064.333.827,-	80,4

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel II.5

Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP.)	% CAPAIAN
1	Peningkatan pendapatan, pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah	226.439.372.000,-	182.064.333.827,-	80,4



Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP TAHUN SEBELUMNYA

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2020 memperoleh nilai sebesar 72.95 (Tujuh Puluh Dua Koma Sembilan Lima) atau dengan predikat penilaian "BB" (Sangat Baik), sebagaimana tabel berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
1	Perencanaan Kinerja	30	25.48	25.23
2	Pengukuran Kinerja	25	17.19	18.13
3	Pelaporan Kinerja	15	12.18	12.18
4	Evaluasi Internal	10	5.12	5.12
5	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	15.01	12.29
Nilai Hasil Evaluasi		100	74.98	72.95
Kategori Penilaian			BB	BB



2. Tindak Lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2020

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Rencana Aksi
1.	Target jangka menengah dalam Renstra dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan	Rencana aksi pada Perencanaan Kinerja telah dilaksanakannya Rapat Review Rensta
2.	IKU dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	IKU telah dimanfaatkan di dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	Rencana aksi pada pengukuran kinerja telah dimanfaatkannya IKU sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
3.	Target kinerja eselon III dan IV dimonitor pencapaiannya	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya	Dengan dilaksanakannya rapat evaluasi kinerja per triwulan
4	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi telah digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	Dengan dilaksanakannya rapat evaluasi kinerja per triwulan
5	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi dilakukan	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan	Dengan dilaksanakannya rapat evaluasi kinerja per triwulan
6	Hasil evaluasi disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan	Hasil evaluasi telah disampaikan melalui notulen rapat evaluasi kinerja
7	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan	Pemantauan Rencana Aksi telah dilaksanakan dalam	Melalui rapat evaluasi kinerja yang telah



BAPENDA

Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur

	kinerja dan dapat memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	rangka mengendalikan kinerja dan dapat memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	dilaksanakan maka dihasilkan solusi serta upaya perbaikan dari permasalahan-permasalahan yang ditemukan
8	Selalu berupaya untuk lebih meningkatkan capaian output dan outcome sehingga pencapaian sasaran/ kinerja organisasi dapat tercapai secara optimal	Bapenda Prov. Kaltim selalu berupaya meningkatkan capaian output dan outcome untuk mencapai sasaran yang optimal	Melalui Peraturan Gubernur (Pergub), Pemerintah Provinsi Kaltim mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak berupa pemberian diskon pajak kendaraan bermotor dan pembebasan sanksi administrasi serta inovasi yang diluncurkan pada tahun 2021 adalah mobil Samsat Pelita (Pengurusan Lima Tahun). Layanan berjalan ini dapat melayani kepengurusan pajak kendaraan bermotor tahunan hingga lima tahunan.

**B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya adalah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indicator output saja, tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan.

Sesuai dengan Proyeksi Pendapatan pada RPJMD Tahun 2019-2023 yang dijabarkan pada tabel ini:

Tabel III.1**Proyeksi Target Pendapatan Daerah 2019-2023**

KOMPONEN PENERIMAAN	2019	2020	2021	2022	2023
PENDAPATAN DAERAH	10.549.624.013.250	10.954.474.227.000	9.590.400.000.000	11.001.164.310.744	12.136.620.129.155
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.452.964.353.550	5.912.974.720.000	5.396.942.567.871	5.986.210.931.582	7.037.700.381.642
DANA PERIMBANGAN	5.059.832.628.500	5.029.079.507.000	4.180.730.432.129	5.002.354.579.162	5.086.179.747.513
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	36.827.031.200	12.420.000.000	12.727.000.000	12.598.800.000	12.740.000.000

Sehingga Target Kinerja Tahun 2021 pada Indikator Kinerja adalah sebesar Rp9.590.400.000,-. Dan untuk capaian setiap triwulannya adalah sebagai berikut:

**Tabel III.2****Capaian Kinerja Tahun 2021 per triwulan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Peningkatan pendapatan, pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah realisasi pendapatan	Rupiah	Rp9.590.400.000.000,-	1	1.918.080.000.000	1.848.030.851.051,73	96,35
					2	4.315.680.000.000	3.730.798.994.339,27	86,45
					3	6.713.280.000.000	5.789.078.362.785,35	86,23
					4	9.590.400.000.000	10.091.132.219.000,10	105,22

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja adalah hasil – hasil perhitungan dari pengukuran kinerja yang ditetapkan berbanding dengan realisasi pelaksanaannya, dimana untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat diketahuinya pencapaian target yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi yang telah dicapai, serta kemajuan - kemajuan yang dialami dan kendala yang ditemukan dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran strategis, indikator kinerja dan program serta kegiatan yang telah ditetapkan.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Sesuai dengan laporan Penerimaan Pendapatan Bapenda Prov. Kaltim Tahun 2021 pada tabel dibawah ini:

No	Komponen Penerimaan	Proyeksi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Kinerja 2021 (Rp)	Capaian %
1	Pendapatan Asli Daerah	5.396.942.567.871,00	6.190.163.670.244,10	114,70
2	Pendapatan Transfer	4.180.730.432.129,00	5.592.564.661.777,00	92,98
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	12.727.000.000,00	13.905.055.000,00	109,26
	Jumlah	9.590.400.000.000,00	10.091.132.219.000,10	105,22

Sumber: Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Bapenda Prov. Kaltim



BAPENDA

Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur

Maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Tahun 2021 sesuai dengan formulasi perhitungan indikator kinerja adalah:

Tabel III.3 - Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Jumlah realisasi pendapatan	Rupiah	9.590.400.000.000,00	10.091.132.219.000,10	105,22

Sumber: Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Bapenda Prov. Kaltim

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Tabel III.4 - Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/ Penurunan
			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Jumlah realisasi pendapatan	Rupiah	Rp10.132.975.825.542,60	Rp10.091.132.219.000,10	-0,41%

Sumber: Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Bapenda Prov. Kaltim

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi

Tabel III.5 - Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap target tahun akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Target Akhir RPJMD Tahun 2023 (Rp)	% Tingkat Pencapaian
1	Jumlah realisasi pendapatan	Rupiah	10.091.132.219.000,00	12.136.620.129.155,00	83,15%

Sumber: Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Bapenda Prov. Kaltim



4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1) Faktor pendukung keberhasilan / kegagalan capaian kinerja

Diketahui, secara umum sepanjang tahun 2021, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mencatatkan capaian kinerja baik. Hal ini terlihat dari penerimaan Pajak Daerah yang keseluruhan komponennya mengalami surplus. Adapun faktor pendorong keberhasilan tersebut sebagai berikut:

a. Perbaikan kondisi ekonomi

Meski masih dibayangi pandemi Covid-19, Kaltim mengalami perbaikan pertumbuhan ekonomi secara signifikan pada tahun 2021 yang berdampak pada membaiknya daya beli masyarakat sehingga turut berpengaruh pada realisasi penerimaan pajak daerah. Membaiknya kinerja sektor utama ekonomi Kaltim juga memberikan pengaruh yakni terhadap meningkatnya harga dan produksi batubara dan migas.

b. Kebijakan pemerintah daerah

Dalam upaya untuk mencapai target, Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim mendapatkan dukungan penuh baik dari Pemerintah Provinsi Kaltim maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Melalui Peraturan Gubernur (Pergub), Pemerintah Provinsi Kaltim mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak berupa pemberian diskon pajak kendaraan bermotor dan pembebasan sanksi administrasi. Beleid ini berhasil menjadi stimulus positif untuk meningkatkan penerimaan PKB dan BBNKB. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota turut membantu dalam menggaungkan kebijakan yang ada.

c. Peningkatan dan digitalisasi pelayanan

Salah satu faktor pendukung keberhasilan adalah peningkatan pelayanan. Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim meluncurkan inovasi, meningkatkan kualitas, dan melakukan digitalisasi pelayanan



kesamsatan. Inovasi yang diluncurkan membuat masyarakat semakin mudah dalam membayar pajak kendaraan karena semakin dekat dan pilihan cara pembayarannya pun lebih banyak. Salah satu inovasi yang diluncurkan pada tahun 2021 adalah mobil Samsat Pelita (Pengurusan Lima Tahun). Layanan berjalan ini dapat melayani kepengurusan pajak kendaraan bermotor tahunan hingga lima tahunan.

2) Permasalahan

Meski mencapai target terdapat beberapa kendala yang juga menjadi tantangan Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Sejalan dengan perkembangan teknologi, Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim melakukan digitalisasi pelayanan. Hal ini otomatis membutuhkan kondisi jaringan yang stabil. Sayangnya di lapangan masih terdapat beberapa masalah yang membuat jaringan menjadi terganggu.
- b. Kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM). Sebab, peningkatan pelayanan yang dilakukan Bapenda membutuhkan tambahan SDM yang mumpuni agar seluruh aktivitas dapat berjalan dengan baik.
- c. Ketidakesuaian para pemegang izin Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dalam penyetoran dan pelaporan PBBKB sehingga memungkinkan hilangnya sebagian potensi penerimaan PBBKB.
- d. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat varian Delta menyebabkan mobilitas dan kegiatan masyarakat menurun sehingga berimplikasi terhadap penerimaan pajak retribusi.



- e. Proses penyaluran alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) beserta Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KB DBH) memperhatikan kondisi penerimaan negara, jika penerimaan negara tidak memungkinkan, maka penyaluran akan disesuaikan pada tahun berikutnya.

3) Solusi

Guna menyelesaikan permasalahan di atas, solusi yang dilakukan diantaranya:

- a. Menyiapkan petugas IT khusus untuk memastikan kestabilan jaringan. Adapun pemantauan dilakukan mulai dari keamanan server, pemeliharaan server dan peralatan pendukung lainnya, serta melakukan komunikasi secara tanggap kepada penyedia jasa jaringan apabila terdapat masalah.
- b. Sementara untuk kurangnya sumber daya manusia, Bapenda mengajukan penambahan tenaga kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim dan melakukan optimalisasi kinerja terhadap sumber daya manusia yang telah tersedia.
- c. Melakukan Audit terhadap para pemegang izin Wajib pungut yang ada diwilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Membuat Pergub insentif pemungutan sebesar 3 % dari rencana penerimaan Retribusi untuk OPD/UPTD Pemungut sebaga pendorong/semangat dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
- e. Koordinasi dan rekonsiliasi secara intensif dengan pemerintah pusat terkait kebijakan dan penyaluran Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil.



4) Upaya

Secara umum arah kebijakan untuk pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah dilakukan melalui instensifikasi dan ekstensifikasi yang meliputi:

- a. Melakukan kajian secara holistik untuk seluruh potensi pendapatan daerah di seluruh lingkup perangkat daerah.
- b. Untuk memberikan kemudahan pembayaran pajak oleh masyarakat/Wajib Pajak maka Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan dan pengembangan layanan.
- c. Optimalisasi penanganan pemungutan piutang pajak dan retribusi melalui inventarisasi dan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan Instansi Vertikal, Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Melakukan pengendalian dan Pengawasan terhadap penjualan/distribusi BBM sektor Industri oleh Tim yang terdiri dari Inspektorat, BPKP Perwakilan Prov. Kaltim, dan Kepolisian terhadap penerimaan dari Wajib Pungut.
- e. Penertiban ijin wajib pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- f. Perubahan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPA) dengan rumusan perhitungan dari tim terkait.
- g. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai langkah Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h. Melakukan cleansing data base kendaraan bermotor melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.



- i. Pembaharuan regulasi melalui revisi kebijakan terhadap peraturan untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya optimalisasi Pendapatan Daerah.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.6 - Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	4	5	6 (4-5)
1	Peningkatan pendapatan, pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah	105,22%	80,4%	24,82%

Hal ini menunjukkan bahwa dalam mencapai sasaran tersebut anggaran yang disediakan dipergunakan dengan efisien. Harapan pada tahun-tahun selanjutnya, efisiensi terhadap penggunaan dana untuk mencapai sasaran dapat ditingkatkan.

Tabel III.7 - Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Eefisiensi	Persentase	Jumlah Program / Kegiatan yang dialokasikan		Total Program / Kegiatan		Ket.
					Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020	197.445.025.240,47	163.950.201.528,87	-33.494.823.711,60	83,04%	9	19	9	19	
2021	226.439.372.000,00	182.064.333.825,00	-44.375.038.175,00	80,40%	3	12	3	12	-

**D. REALISASI ANGGARAN**

Pada Tahun Anggaran 2021 Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim melaksanakan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel III.8**Realisasi Anggaran Sesuai dengan Perjanjian Kinerja**

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA			ANGGARAN		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan pendapatan, pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah	9.590.400.000.000	10.091.132.219.000	105,22%	226.439.372.000,00	182.064.333.825,00	80,40%

**BAPENDA**

Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur

Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2021 per Program/Kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel III.9**Realisasi Anggaran Tahun 2021 per Program/Kegiatan**

Kode	Nama Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)	Status
1	2	3	6	7	8
5.02.0.00.0.00.01	Badan Pendapatan Daerah	226.439.372.000,00	182.064.333.825,00	80,40%	H
5.02.0.00.0.00.01.00	Badan Pendapatan Daerah	226.439.372.000,00	156.658.349.846,00	78,91%	H
5.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	215.250.297.000,00	174.512.260.437,00	81,07%	H
5.02.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	892.125.000,00	717.000.655,00	80,37%	H
5.02.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	140.331.122.000,00	111.842.568.578,00	79,70%	H
5.02.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	221.875.000,00	212.576.145,00	95,81%	H
5.02.001.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	3.741.525.000,00	1.837.497.855,00	49,11%	K
5.02.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	929.125.000,00	657.496.552,00	70,77%	H
5.02.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.323.118.391,00	5.597.808.023,00	76,44%	H
5.02.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.904.066.498,00	28.684.423.466,00	89,91%	H
5.02.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.698.574.001,00	22.435.698.628,00	84,03%	H
5.02.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.208.766.110,00	2.527.190.535,00	78,76%	H
5.02.002	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.145.950.000,00	654.933.456,00	57,15%	H
5.02.002.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	512.550.000,00	197.833.053,00	38,60%	K
5.02.002.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	633.400.000,00	457.100.403,00	72,17%	H
5.02.004	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10.043.125.000,00	6.897.139.934,00	68,68%	H
5.02.004.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.043.125.000,00	6.897.139.934,00	68,68%	H



Bab IV Penutup

KESIMPULAN

Sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 telah berupaya melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 . Adapun Program dan kegiatan tersebut didukung dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak secara tepat waktu, tersedianya gedung kantor yang representatif serta sarana dan prasarana pelayanan lainnya yang memadai. Disamping itu faktor dukungan Sumber Daya Manusia merupakan hal penting yang secara bersama - sama memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat wajib pajak. Diharapkan dengan adanya beberapa fasilitas / ketersediaan sarana dan prasarana tadi dapat mendorong usaha untuk mencapai penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berbagai program dan kegiatan yang mendorong optimalisasi pendapatan telah dilaksanakan, disamping menunjukkan keberhasilan sesuai dengan kebijakan - kebijakan yang telah ditetapkan, namun disini lain masih terdapat kekurangan dan permasalahan yang perlu perhatian dan ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. Menyikapi kondisi tersebut Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur akan terus berusaha menumbuhkan inovasi – inovasi serta pengembangan pendapatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Harapan tersebut diatas adalah dalam kerangka melaksanakan Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur



BAPENDA

Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur

yaitu ***"Peningkatan pendapatan, pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah"***

S A R A N

Dengan LKJIP ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang baik, sehingga nantinya tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

Diharapkan LKJIP tahun 2021 yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan serta dipergunakan sebagai pedoman dalam penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 yang konsisten dan berkomitmen.

Demikian LKJIP Tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dibuat dan disampaikan untuk menjadi bahan penilaian kinerja lebih lanjut.

**KATA PENGANTAR**

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan Instansi Pemerintah Setingkat Eselon II untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang menganut kepada Prinsip Akuntabilitas yaitu Efisiensi, Efektifitas, Transparansi serta gambaran tingkat pencapaian sasaran dan tujuan sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi Organisasi kedepan dalam rangka memberhasilkan Pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam penyajian LKjIP ini berpedoman kepada format yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) ini, bertujuan memberikan informasi mengenai Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya serta untuk keperluan koordinasi dengan instansi / unit kerja Pengelola Pendapatan Daerah lainnya yang tetap berbasis kepada upaya pelayanan prima dalam pengelolaan sumber – sumber Pendapatan Daerah.

Demikian Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) ini, diharapkan bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan.

Samarinda, 17 Februari 2022

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

Dra. Hj. Ismiati, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19650914 199012 2 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Perda Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) dan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur telah berupaya secara maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, tertib dan lancar. Melalui pengukuran kinerja, pencapaian hasil kerja atau nilai berdasarkan sasaran strategis yang direncanakan sesuai dengan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi dan misinya, maka penetapan indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang meliputi penilaian sebagai berikut:

Peningkatan Pendapatan Pelayanan dan Pengawasan Sumber-sumber Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2021 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp226.439.372.000,- dengan realisasi sebesar Rp182.064.333.827,- tercapai sebesar 80,4%.

Khusus dalam pelaksanaan penyerapan anggaran, Nilai Akuntabilitas Keuangan secara kuantitatif masih terdapat sisa anggaran. Hal ini terjadi karena ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, namun secara kualitatif pencapaian telah dapat diserap dan direalisasikan dan telah dilakukan secara optimal berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan.

Terhadap beberapa permasalahan yang timbul dan terjadi telah dapat diatasi dengan baik, meskipun permasalahan tersebut secara berkelanjutan perlu mendapat perhatian dalam rangka menciptakan peningkatan kualitas kinerja yang berdampak pada optimalisasi kualitas sumber daya manusia / personil di Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi APBD maka seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berupaya



BAPENDA

Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur

untuk memperbaiki pelaksanaan kinerja melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan secara tertib perencanaan, tertib anggaran, tertib pelaksanaan, dan tertib administrasi untuk meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI secara berturut-turut.

Dengan diraihnya kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka diharapkan kinerja yang dihasilkan dapat memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pemegang pengelola pendapatan daerah, dalam pelaksanaan peran dan fungsinya berorientasi pada peningkatan pelayanan, pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang dimiliki dalam segala bidang guna menyiapkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, meningkatkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi berkelanjutan, melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana yang telah ada, meningkatkan kerjasama antara pemerintah, mitra kerja dan masyarakat, meningkatkan kinerja aparatur, menyusun perencanaan yang mampu menjawab permasalahan serta mengantisipasi peluang dan tantangan di masa mendatang.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas Pokok, dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Manusia	6
E. Aspek Strategis Organisasi	8
F. Isu Strategis	9
G. Sarana dan Prasarana Kantor	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	19
A. Rencana Strategis	19
1. Tujuan	20
2. Sasaran	20
3. Indikator Kinerja	22
4. Strategi	23
5. Kebijakan	24
6. Program	27
B. Indikator Kinerja Utama	28
C. Perjanjian Kinerja	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	31
1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	31
2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi	32



BAPENDA

Badan Pendapatan Prov. Kalimantan Timur

B. Pengukuran Capaian Kinerja	34
C. Analisis Capaian Kinerja	35
1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.....	35
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir	36
3. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja.....	37
4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41
D. Realisasi Anggaran	42
 BAB IV PENUTUP	 44
SARAN	45

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
1. Struktur Organisasi Bapenda Prov. Kaltim	5
2. Pejabat Struktural Bapenda Prov. Kaltim.....	6
3. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan	7
4. Persentase Jumlah Pegawai Bapenda Prov. Kaltim Berdasarkan Pendidikan	8

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan	8
2. Tujuan Strategis, dan Indikator Kinerja Tahun 2021	19
3. Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Prov. Kaltim	28
4. Perjanjian Kinerja Tahunan Anggaran 2021	29
5. Target Belanja Bapenda Prov. Kaltim Tahun 2021.....	30
6. Anggaran Belanja Langsung	30
7. Proyeksi Target Pendapatan Daerah 2019-2023	34
8. Capaian Kinerja Tahun 2021 per triwulan	35
8. Capaian Kinerja Tahun 2021.....	36
9. Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	36
10. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap target tahun akhir RPJMD	36
10. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	41
11. Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan.....	41
12. Realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja	42
11. realisasi Anggaran Tahun 2021 per program/kegiatan	43